



Urgensi Institusi Dalam Mengevaluasi Kinerja Perekonomian Nasional

Menjelang akhir tahun atau memasuki awal tahun biasanya muncul banyak diskusi tentang evaluasi kinerja perekonomian nasional. Berbagai indikator ekonomi makro disuguhkan dengan lengkap untuk memotret hasil kerja para pelaku ekonomi secara agregat selama setahun terakhir dan memprediksi perkembangannya tahun ke depan. Tidak heran lalu disajikanlah data-data dalam angka, tabel, atau grafik perihal pertumbuhan ekonomi, inflasi, kurs, suku bunga, perdagangan internasional, cadangan devisa, tingkat pengangguran, dan beberapa indikator ekonomi utama lainnya. Hasil analisis pada akhirnya ingin mengetahui kemajuan atau kemunduran perekonomian nasional dalam jangka pendek selama setahun terakhir.

Jika dicermati betul-betul, sayangnya belum ada yang secara khusus memberi perhatian lebih mendalam tentang peran variabel institusi di dalam mengevaluasi kinerja perekonomian nasional. Variabel institusi nampaknya masih absen sebagai indikator penting. Variabel institusi memang masih dianggap belum layak atau pantas menjadi indikator utama kinerja perekonomian nasional. Entah apa yang melatarbelakangnya. Padahal, selama lebih dari tiga dekade terakhir, banyak ahli ekonomi telah memberi perhatian penting variabel institusi dan hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi di negara maju dan negara sedang berkembang (Karimi dan Da'ari, 2018). Dinyatakan bahwa institusi yang baik mampu menghasilkan struktur insentif yang mengurangi ketidakpastian dan mendorong efisiensi yang mana kesemuanya itu menjadi faktor penting untuk keberhasilan dalam memperoleh kinerja perekonomian (Zaaruka dan Fedderke, 2011). Hasil studi empiris juga telah menunjukkan bahwa kualitas institusi menjadi pembada penting mengapa pertumbuhan ekonomi di negara-negara tertentu berhasil berkembang dan maju, sementara di negara-negara lain tidak demikian.



Florentinus Nugro Hardianto
Dosen Program Studi
Ekonomi, FE-USD
fhnugroho@gmail.com

Institusi, menurut Douglass C. North (1990), adalah *the rules of the game in a society or, more formally, are the humanly devised constraints that shape human interaction*. Institusi bisa dikatakan sebagai aturan main dalam suatu masyarakat atau batasan-batasan yang dirancang manusia yang mempengaruhi hubungan interaksi manusia tersebut. Institusi itu mencakup aturan formal, aturan informal, dan mekanisme penegakan aturan (Douglass C. North, 1994). Aturan formal yang dimaksud mencakup semua peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah dari hirarki tertinggi hingga terendah. Sementara aturan informal lebih mengacu kepada segala norma lain di luar norma hukum yang berlaku di tengah masyarakat seperti norma sosial, norma agama, norma adat, dan lain-lain.

Hasil penelusuran literatur-literatur yang terkait menunjukkan bahwa ada tiga pendekatan untuk menjelaskan hubungan antara variabel institusi dan kinerja pertumbuhan ekonomi (Hardianto, 2018). Pertama, pendekatan *modernisation hypothesis* menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi mempengaruhi kualitas institusi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara bisa berdampak positif terhadap perkembangan kualitas institusi negara tersebut. Kedua, pendekatan *critical juncture hypothesis* mengemukakan bahwa kualitas institusi berperan penting tercapainya pertumbuhan ekonomi. Kualitas institusi menentukan efektivitas dan efisiensi regulasi yang menentu-

kung pembangunan ekonomi suatu negara.

Ketiga, pendekatan *bidirectional causality* menyatakan adanya hubungan kausalitas dua arah antara variabel institusi dan kinerja perekonomian. Menurut pendekatan yang ketiga ini variabel kualitas institusi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, dan demikian juga sebaliknya. Pembangunan ekonomi dan pembangunan institusi hendaknya dilakukan secara bersama-sama sehingga dapat menghasilkan sinergi yang saling mendukung satu dengan lainnya. Keberhasilan pembangunan ekonomi dan keberhasilan pembangunan institusi terkait satu dengan lainnya.

Hasil penelitian untuk kasus di Indonesia mengindikasikan bahwa hubungan kausalitas antara kualitas institusi dan pertumbuhan ekonomi mengarah kepada hubungan kausalitas dua arah (Hardianto, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel saling terkait yang mana keberhasilannya pembangunan ekonomi menjadi syarat keberhasilan pembangunan institusi dan bahwa keberhasilan pembangunan institusi menjadi syarat keberhasilan pembangunan ekonomi.

Dengan demikian penting kiranya ketika memaparkan hasil evaluasi kinerja perekonomian Indonesia hendaknya tidak melupakan pula paparan perkembangan kualitas institusi yang terjadi selama setahun terakhir secara eksplisit dan proporsional. Indikator-indikator kualitas institusi seperti kualitas peraturan-perundangan yang berlaku, kualitas *property rights*, kualitas peradilan & penegakan hukum, kualitas tata kelola birokrasi pemerintahan, kualitas pelayanan publik, tingkat biaya transaksi, kualitas modal sosial, indeks persepsi korupsi, dan indikator kinerja institusi lainnya hendaknya juga dikupas dengan lengkap untuk melengkapi data-data indikator ekonomi makro yang sudah umum tersaji.

Laporan publikasi *The Worldwide Governance Indicators (WGI)* (<https://info.worldbank.org/governance/>

wgi/), misalnya, bisa dijadikan sumber data untuk mengevaluasi kualitas institusi secara reguler tiap tahun di sejumlah negara di dunia termasuk kualitas institusi di Indonesia. Pada tahun 2018 atas dasar laporan publikasi WGI, skor kualitas institusi di Indonesia untuk indikator *voice and accountability* sebesar 0,18(52); *political stability and absence of violence* sebesar 0,53(27); *government effectiveness* sebesar 0,18(59); *regulatory quality* sebesar -0,07(50); *rule of law* sebesar -0,31(42); dan *control of corruption* sebesar -0,25(46). Sementara pada tahun 2017, skor kualitas institusi di Indonesia untuk indikator *voice and accountability* sebesar 0,13(50); *political stability and absence of violence* sebesar 0,50(29); *government effectiveness* sebesar 0,04(54); *regulatory quality* sebesar -0,11(51); *rule of law* sebesar -0,35(40); dan *control of corruption* sebesar -0,25(48). Skor bernilai antara -2,50 (terburuk/terlemah) sampai 2,50 (terbaik/terkuat). Angka dalam kurung adalah peringkat dari 132 negara yang disurvei. Data-data indikator tersebut menunjukkan kualitas institusi di Indonesia pada tahun 2018 tidak berbeda jauh dengan kualitasnya pada tahun sebelumnya. Perkembangan kualitas institusi tahun 2018 ini tentu saja memiliki hubungan erat dengan perkembangan kinerja perekonomian di Indonesia secara menyeluruh pada tahun 2018.

Demikianlah urgensi indikator kualitas institusi dapat melengkapi data-data makro ekonomi sebagai bahan masukan dalam menilai kinerja perekonomian nasional secara lebih utuh dan lengkap. Ke depannya, variabel institusi hendaknya mulai disandingkan secara eksplisit dengan variabel ekonomi makro lainnya. Harapannya sejauh mana kualitas dan kontribusi penting variabel institusi dalam pembangunan ekonomi juga dapat diungkap dan disajikan sebagai bagian tak terpisahkan dalam mengevaluasi perkembangan perekonomian nasional setiap tahunnya.